

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 merupakan tahun keenam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Purbalingga, januari 2022

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	11
2.3. Isu–isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.....	18
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>19</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	20
3.3. Program dan Kegiatan.....	22
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>27</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan Kebijakan Nasional bidang Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu “

**lingga yang mandiri, berdaya saing menuju masyarakat sejahtera berakhlak mulia”.** Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (SAKIP);

- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 didasarkan pada Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III : Rencana, Program, dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TAHUN LALU

#### 2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga urusan pemerintahan mengenai Bidang Koperasi dan UMKM diserahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada tahun 2021 terdapat 7 Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Visi "***Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia***".

Dari 7 Program yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan ke satu hampir semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan Capaian fisik Program dan Kegiatan sampai dengan Tri wulan IV Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga mencapai 108,95% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94,05 %.

Hasil Evaluasi rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2021 Tri wulan IV khususnya di Bidang Koperasi dan UMKM adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah :



**Tabel 2.1**  
**Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga**  
**Periode Pelaksanaan Tahun 2021**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Aktif									
2.17.03.2.01.01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewangan	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	186 koperasi	100 koperasi	120 koperasi	120 koperasi	120 koperasi	100	120 koperasi	120 koperasi	100

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	kabupaten										
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang sudah menerapkan Standar SAK									
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	125 koperasi	100 koperasi	120 koperasi	120 koperasi	100	150 koperasi	120 koperasi	80
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	40 koperasi	0 koperasi	0 koperasi	0 koperasi	0 koperasi	0	6 paket	6 paket	100
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi									

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		bidang perkoperasi									
2.17.0 5.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah (jenis dan peserta) diklat kompetensi perkoperasian	4/125	0 pengelola koperasi	0 pengelola koperasi	4/25 pengelola koperasi	4/25 pengelola koperasi	100%	4/145 Pengelola Koperasi	3/130 pengelola koperasi	89,6
2.17.0 5.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM Yang dilatih	100	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 %	100 Koperasi	76 koperasi	76
2.17.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	Persentase Koperasi yang meningkat usahanya									

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KOPERAS										
2.17.0 6.2.01.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota	Penambahan jumlah unit koperasi yang meningkatkan kualitasnya		30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	100	25 koperasi	23 koperasi	92%
<b>2.17.0 7</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>										
2.17.0 7.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Sertifikasi Tanah Bagi Pelaku UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.0 7.2.01. 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya Workshop Kewirausahaan	300 Unit	60 Unit	60 unit	60 unit	60 unit	100	60 unit	60 unit	100
2.17.0 7.2.01. 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Temu Usaha Pelaku UMKM	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100
2.17.0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan dalam pameran di luar daerah									
2.17.0 8.2.01. 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pemasaran	400 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	100	178 UMKM	172 UMKM	96,6

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**  
**Kabupaten Purbalingga**

FORM EVALUASI KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016-2021

NO	IKU RENSTRA OPD	SATUAN	TARGET PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	Persen	42	49	51	54	57	23	45,5	49,15	54	55,28	56,97
2	UMKM Naik Kelas	Angka	NA	20	21	22	23	NA	20	22	23	25	29

**LAMPIRAN II**

**FORM EVALUASI KINERJA PROGRAM RKPD KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN II (JULI – SEPTEMBER) TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Program (Sesuai indikator RPJMD dan Program Permendagri No.90 Tahun 2020 jo Kepmen No.050-3708 Tahun 2020)	Satuan	RPJMD 2016 - 2021 (TAHUN 2021)	Realisasi Pada Triwulan (TAHUN 2021)				OPD Penanggung jawab
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>							
<b>1.</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</b>	Target Akhir						
	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkopersian	Persen	25	7%	12%	20%	25%	Dinkop UKM
<b>2.</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>							
	Persentase koperasi yang meningkat Kualitasnya	Persen	7	4%	5%	6%	7%	Dinkop UKM
<b>3.</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>							
	Persentase Koperasi Aktif	Persen	73,5	71%	72%	73%	73,50%	Dinkop UKM
	Jumlah Anggota koperasi	Orang	52.928	52.127	52.316	52.546	54.044	
<b>4.</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>							
	Persentase koperasi yang sudah menerapkan Standar SAK	Persen	74	25,8%	41,20%	52,30%	74%	Dinkop UKM
	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	135	47	61	83	98	
<b>5.</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha kecil dan Usaha Mikro</b>							
	Jumlah Usaha mikro yang Mandiri/Berdaya	Pelaku	5	1	2	1	3	Dinkop UKM
	Pertambahan Jumlah UMKM baru	Unit	133.133	188	250	100	219	
	Pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor	Unit	45	-	1	0	0	
<b>6.</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>							
	Jumlah UMKM yang sudah difasilitasi promosi dan Pemasaran	unit	300	60	64	155	21	
	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	Unit	250	63	77	155	0	
	Jumlah UMKM yang meningkat Omsetnya	Pelaku	4	-	1	3	1	Dinkop UKM

**LAMPIRAN III**

**FORM EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN II (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2021**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2021)										Capaian Realisasi (TAHUN 2021) (%)		OPD Penanggung jawab
							I		II		III		IV		TOTAL				
							6	7	8	9	(10=6+7+8+9)		(11=10/5*100)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	12
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				6.297.564.500		825.892.861	10	1.327.064.694	-	921.688.148	-	2.783.057.628	10	5.922.876.879		94,05	Dinkop UKM
	ASN Dinkop UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Nilai AKIP, Ikm,SKP,Persentase temuan yang ditindak lanjuti			2.782.349.000		482.517.021	6	816.386.994	-	586.018.090	-	718.673.805	22	2.610.095.910		93,81	Dinkop UKM
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN			2.340.980.000	5	438.263.079		714.900.215		505.591.373		535.543.049	5	2.194.297.716		93,73	Dinkop UKM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	Bulan	12	2.144.797.000	3	430.563.079	6	678.325.965		473.461.479	3	445.795.268	12	2.028.145.791	100	94,56	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Perjalanan Dalam dan Luar daerah	OK	157	79.209.000		0	12	7.374.250		4.579.894		56.273.975	12	68.228.119	7,643	86,14	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Penunjang Operasional Kantor	Orang /bln	18	112.350.000	2	7.700.000	4	27.550.000		27.550.000		31.791.706	6	94.591.706	33,33	84,19	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen LKD, SPM	Bulan	12	4.624.000		0	7	1.650.000		0		1.682.100	7	3.332.100	58,33	72,06	



	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>116.407.000</b>	<b>0</b>	<b>12.852.000</b>		<b>21.933.102</b>	-	<b>24.030.669</b>	-	<b>49.662.041</b>	-	<b>108.477.812</b>	-	<b>93,2</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	jumlah keb.komponen listrik,penerangan bangunan,	unit/b h	12	1.511.000				-				1.451.000	-	1.451.000	<b>0</b>	<b>96,03</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah keb.peralatan rumah tangga	unit/b h	2	6.500.000				-	2.550.000			3.800.000	-	<b>6.350.000</b>	<b>0</b>	<b>97,69</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jmh kebutuhan tabung gas,perabot kantor	Paket	1	69.764.000		12.852.000	2	14.107.752		14.835.519		23.711.416	2	<b>65.506.687</b>	<b>200</b>	<b>93,90</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jmh keb.barang cetak dan penggandaan	Lembar	8200	8.370.000			<b>1500</b>	1.318.750		1.065.550		3.666.200	<b>1.500</b>	<b>6.050.500</b>	<b>18,29</b>	<b>72,29</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jmh keb.surat kabar,peraturan perundang2an	Exemplar/bln	60	2.160.000				-		760.000		1.400.000	-	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Bahan/Material	jmh kebutuhan ATK, Amplop dinas, dan kwitansi	jenis	32	11.302.000				1.256.600		2.969.600		6.277.200	-	<b>10.503.400</b>	<b>0</b>	<b>92,93</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jmh kebutuhan jamuan makan dan minum	ok	800	16.800.000			<b>400</b>	5.250.000		1.850.000		9.356.225	<b>400</b>	<b>16.456.225</b>	<b>50</b>	<b>97,95</b>

		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>35.850.000</b>	<b>3</b>	<b>8.000.000</b>	-	-		<b>17.500.000</b>	-	<b>2.940.000</b>	<b>3</b>	<b>34.940.000</b>		<b>97,46</b>
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin Penunjang Kinerja ASN	unit/bh	8	21.350.000	3	8.000.000	-	-		17.500.000		2.940.000	3	20.440.000	37,5	95,74
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	unit	1	14.500.000			-	-				14.500.000		14.500.000		100
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>118.475.000</b>	<b>8</b>	<b>19.451.942</b>	-	<b>26.231.677</b>	-	<b>28.897.396</b>	-	<b>37.943.614</b>	<b>8</b>	<b>112.524.629</b>		<b>94,98</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, peranko dan jasa Pengiriman	Bulan	12	875.000			-	-		681.500		91.500	-	773.000	0	88,34
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan telepon,SDA,dan listrik,internet,telepon kepala dinas	bulan	12	40.800.000	6	6.651.942		7.031.677		9.015.896		12.252.114	6	34.951.629	50	85,67
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat Makmin Tamu dll	orang/bln	2	76.800.000	2	12.800.000		19.200.000		19.200.000		25.600.000	2	76.800.000	100	100
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terfasilitasnya jasa pemeliharaan fasilitas Pemerintah Daerah</b>			<b>160.705.000</b>		<b>3.950.000</b>		<b>50.947.000</b>	-	<b>9.998.652</b>	-	<b>85.153.201</b>	-	<b>150.048.853</b>		<b>93,37</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, By Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapanagn Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Unit kendaraan	22	74.120.000	11	3.200.000	13	6.323.000		9.733.652		47.369.201	22	66.625.853	100	89,89
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Penunjang Kinerja ASN	jenis	9	16.800.000	4	750.000		2.774.000		265.000		10.000.000	4	13.789.000	44,44	82,08

	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebelair	unit					-				-	0			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	unit	2	69.785.000			41.850.000	0		27.784.000	-	69.634.000	0	99,78	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan bahan dan jasa perkantoran</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>9.932.000</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2.375.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.431.900</b>	<b>6</b>	<b>9.806.900</b>	<b>6</b>	<b>98,74</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesainya dokumen Renstra, Renja, LKPD, LPPD, LKD, RKP, SPIP	Dokumen	2	6.445.000		6	2.375.000			3.974.900	6	6.349.900	6	98,52	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesainya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LK, KJIP, Rekon, Aset, LKPJ, SPJ)	Dokumen	4	3.487.000			-			3.457.000	-	3.457.000	0	99,14	

	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>			<b>62.724.100</b>	<b>5</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-</b>	<b>9.640.000</b>	<b>-</b>	<b>10.899.000</b>	<b>-</b>	<b>31.924.850</b>	<b>5</b>	<b>56.263.850</b>		<b>89,70</b>
	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Penambahan Unit Koperasi Aktif</b>			<b>62.724.100</b>	<b>5</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-</b>	<b>9.640.000</b>		<b>10.899.000</b>	<b>-</b>	<b>31.924.850</b>	<b>5</b>	<b>56.263.850</b>		<b>89,70</b>
	Pengawasan kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	Unit	120	62.724.100	5	3.800.000		9.640.000		10.899.000		31.924.850	5	56.263.850	4,167	89,70
	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Persentase koperasi yang sudah menerapkan Standar SAK</b>			<b>63.198.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.386.070</b>		<b>60.386.070</b>		<b>95,55</b>
	<b>Kegiatan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah kab/kota</b>	<b>Jumlah Penambahan Unit Koperasi yang menerapkan Standar SAK</b>			<b>63.198.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>60.386.070</b>	<b>-</b>	<b>60.386.070</b>		<b>95,55</b>
	Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Unit	120	24.448.000		0		-		0		23.136.070	-	23136070	0	94,63

	Penghargaan Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang mendapat Penghargaan	Unit	6	38.750.000	0	-	0	37.250.000	-	37250000	0	96,13			
	<b>Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian</b>	<b>Persentase SDM koperasi Yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian</b>			482.554.000	30	21.475.000	4	971.000	-	50.895.000	-	231.669.250	34	363.683.798	75,37
	<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wil Keanggotaannya dalam daerah kab/kota</b>	<b>Persentase tingkat kelulusan diklat kompetensi Perkoperasian</b>			482.554.000	30	21.475.000	4	971.000	-	50.895.000	-	106.038.950	34	179.379.950	37,17
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah(jenis dan Peserta) diklat kompetensi perkoperasian	Orang	120	242.250.000	30	21.475.000	4	971.000	50.895.000	106.038.950	34	179.379.950	28,33	74,05	
	<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kan/kota</b>				240.304.000	-	-	-	-	58.673.548	-	125.630.300		184.303.848	76,70	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	jumlah SDM UKM yang dilatih	Orang		240.304.000					58.673.548	125.630.300		184.303.848	76,70		
	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya</b>			202.147.000	-	-	1.620.000	-	5.670.000	-	176.712.417	-	184.002.417	91,02	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota</b>	<b>Penambahan jumlah unit koperasi yang meningkat kualitasnya</b>			202.147.000	-	-	1.620.000	-	5.670.000	-	176.712.417	-	184.002.417	91,02	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan mnj, standarisasi, dan restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan	Unit, K ali	1	202.147.000	-	-	1.620.000	5.670.000	176.712.417	-	184.002.417	0	91,02		

	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang mandiri/berdaya</b>			1.347.799.400	6	134.802.000	-	412.016.000	-	250.780.408	-	541.031.029	6	1.338.629.437	99,32
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</b>	<b>Penambahan jumlah unit Usaha mikro yang bersertifikat/berijin</b>			1.347.799.400	6	134.802.000	-	412.016.000		250.780.408		541.031.029	6	1.338.629.437	99,32
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi perijinan	Unit	60	42.800.000	6	3.800.000		15.700.000		10.700.000		12.600.000	6	42.800.000	100
	Pembedayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kelembagaan UMKM yang difasilitasi Pengembangan usahanya	Paket	1	1.304.999.400		131.002.000		396.316.000		240.080.408		528.431.029	-	1.295.829.437	99,30
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Jumlah UMKM yang meningkat Omsetnya</b>			1.356.793.000		183.298.840	-	86.430.700	-	17.425.650	-	1.022.660.207	-	1.309.815.397	96,54
	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Pertambahan Jumlah Usaha Mikro Naik kelas</b>			1.356.793.000		183.298.840	-	86.430.700		17.425.650	-	1.022.660.207	-	1.309.815.397	96,54
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,serta Design dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pemasaran	Kali,Unit,Paket	20,34,40,400	1.356.793.000		183.298.840		86.430.700		17.425.650		1.022.660.207	-	1.309.815.397	96,54

## 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD dan Catatan Strategis

### 2.3.1. isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/daerah. Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi kompleks. Dilihat dari aspek penyebab, kemiskinan dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Penyebab yang bersifat internal antara lain :

- 1) Keterbatasan kondisi fisik seperti kecacatan (termasuk kecacatan mental)
- 2) Terbatasnya kapasitas dan kompetensi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya
- 3) Keterbatasan kepemilikan asset yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi.

Berdasarkan penyebab yang bersifat eksternal, kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- 1) Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang tidak pro poor
- 2) Kemiskinan cultural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya budaya yang tidak produktif
- 3) Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kondisi lingkungan alam yang kurang menunjang kehidupan masyarakat seperti tanah yang tandus, rawan bencana dan sebagainya.

Tidak hanya kemiskinan yang menjadi isu strategis kesejahteraan masyarakat, pembangunan manusia juga menjadi hak dasar yang dijamin konstitusi. Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan isu strategis bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, keterbatasan modal,

kemampuan pemasaran yang terbatas, akses informasi usaha rendah dan kelembagaan yang belum tertata menjadi faktor utama pula dalam peningkatan produktifitas dan daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah.

### 2.3.2. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
2. Penyertaan modal pada usaha-usaha daerah yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan potensi lokal dan daya saing daerah.
3. Pertumbuhan Koperasi berperan dalam kontribusi pajak untuk pembangunan daerah.

### 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga menjalankan misi ke 5 “ **MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT, DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERDAGANGAN, JASA PARIWISATA, INDUSTRI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM KONDISIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA** ”

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 5 adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran utama sesuai bidang pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :



Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro dan kecil serta Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinkop UKM dengan indikator kinerja :

- **Persentase koperasi sehat.**
- **Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha**
- **Nilai SAKIP DINKOP UKM**

Untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai beberapa program yaitu :

1. Program penguatan kelembagaan Perangkat Daerah
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6. Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan UMKM

**TABEL 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Purbalingga**

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>					<b>7.762.458.200</b>				<b>7.796.480.500</b>	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>3.221.771.200</b>				<b>3.198.871.000</b>	
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Dokumen RENSTRA, RENJA, LKPD, LPPD, LAKIP, LKD, RKPD, SPIP	DinkopUKM	8 lap	10.000.000	APBD	Tambahan dokumen RTP (apa perlu honor Tim)	8 lap	14.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terselesaikannya dokumen Evaluasi PD(LK,LKJIP,Rekon Aset,LKPJ,SPJ)			5.500.000	APBD			6.500.000
2	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan operasional kantor	DinkopUKM	14 Bulan	2.428.737.000	APBD	Gaji dan Tunjangan, tamsil	12 Bulan	2.463.542.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Perjalanan dalam daerah	Kab.Purbalingga	157 OK	115.929.000	APBD	Perjalanan dalam daerah		125.929.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya adms keuangan penunjang Operasional Kantor	Dinkop UKM	20 orang/bulan	105.325.000	APBD	Honor Keuanagn,PHp,Honor Operabr	12 bln	110.000.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen LKD, SPM	DinkopUKM	6 Dokumen	7.000.000	APBD	Honor, ATK,Penggandaan, Cetak		7.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah kebutuhan komponen listrik,penerangan bangunan	DinkopUKM	12 bulan	2.050.000	APBD	Alat alat Listrik, lampu dll	12 bln	3.000.000
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga.	DinkopUKM	6 jenis	5.500.000	APBD		6 jenis	6.000.000
		Penyediaan bahan logistik Kantor	tersedianya kebutuhan tabung gas,perabot kantor	DinkopUKM	12 bulan	90.000.000	APBD		12 bln	95.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Barang cetak danpenggandaan	DinkopUKM	fc 20.000 lbr cetak 6000 lbr dan jilid 200 bh	13.000.000	APBD			14.500.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Koran dan Buku2 yang tersedia	DinkopUKM	24 Exemplar	5.280.000	APBD		24 Exemplar	5.800.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan ATK, Amplop Dinas, dan Kwitansi	DinkopUKM		12.450.200	APBD			13.700.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan makan dan minum	DinkopUKM		12.700.000	APBD			13.900.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Kinerja ASN	DinkopUKM	10 barang Barang	72.000.000	APBD	sarana kerja untuk PLUT werles dll	6 barang	33.000.000
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair	DinkopUKM	7 macam barang	54.500.000	APBD	Pembelian Meubel utk PLUT		20.000.000

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Materai, Perangko, jasa pengiriman	DinkopUKM	Materai 6000=100 lbr, 3000 = 150 lbr, Js.pengiriman	1.200.000	APBD		Materai 6000=100 lbr, 3000 = 150 lbr, Js.pengiriman	1.500.000
		Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik	Tersedianya jaringan telepon,SDA dan Listrik,internet, telepon kepala dinas	DinkopUKM	12bln	47.600.000	APBD		12 bln	50.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Makan minum Rapat, makan minum tamu dll	DinkopUKM		63.200.000	APBD			67.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinn kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinn kendaraan dinas operasional atau lapangan	DinkopUKM	12 bln	80.000.000	APBD		12 bln	83.000.000
		Pemeliharaan Meubel	Terpeliharanya Meubel	DinkopUKM	12 bln	3.000.000	APBD		12 bln	3.000.000
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Penunjang Kinerja ASN	DinkopUKM	12 bln	11.800.000	APBD		12 Bln	12.500.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DinkopUKM	2 Lokasi Gedung	75.000.000	APBD	Pemeliharaan gedung PLUT 50 jt dan kantor 15 jt, pembuatan laman kantor 10 jt		50.000.000
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			<b>Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian</b>			<b>142.250.000</b>				<b>163.587.500</b>
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah (jenis dan peserta) diklat kompetensi perkoperasian	Purbalingga	Pelatihan 100 orang	142.250.000	APBD	1. Pelatihan Kompetensi Pengelola Koperasi 2. Pelatihan Akuntansi Koperasi 3. Studi Komparasi 4. Monitoring Koperasi	120 kop	163.587.500
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			<b>Pertumbuhan volume usaha koperasi</b>			<b>287.147.000</b>				<b>300.000.000</b>
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Penambahan jumlah unit koperasi yang meningkat kualitasnya	Purbalingga	20 koperasi	287.147.000	APBD	1. Lomba inovasi Koperasi 2. Peringatan Harkop 3. Pasar Murah		300.000.000
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			<b>Persentase Koperasi Aktif</b>			<b>98.560.000</b>				<b>100.000.000</b>
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan kekuatan kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi KewenanganKabupaten/Kota	jumlah Penambahan unit koperasi aktif	Purbalingga	170 kop	98.560.000	APBD	Monev, Rakor Pengawasan		100.000.000
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			<b>Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK</b>			<b>100.708.000</b>				<b>120.000.000</b>
8	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi KewenanganKabupaten/Kota	jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Purbalingga	60%	40.000.000	APBD	Penilaian kesehatan 65%		50.000.000
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	Purbalingga	30 koperasi	60.708.000	APBD	Penilaian kesehatan 35%, Penilaian kertas kerja kop award		70.000.000

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			Persentase Peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin			2.780.888.000				2.782.888.000
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang difasilitasi perijinan	Purbalingga	PIRT,MERK,IU MK	98.000.000	DAU	70 hak merk,3 kali sosialisasi		100.000.000
		Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah kelembagaan UMKM yang difasilitasi pengembangannya	pbg,regional dan nasional	Pelatihan2, magang, study komparasi, honor pendamping umkm 9 org, honor thl 4 org, Honor PLUT 6 Org,honor pendamping kecamatan 18 org	2.682.888.000	DAU	Tambahan Honor Pendamping PLUT 6 Orang, honor pendamping kecamatan 18 org x 1,9jx12 bln		2.682.888.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			<b>Persentase UMKM yang difasilitasi melalui internet</b>			1.131.134.000				1.131.134.000
10	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran	Barlingmascak eb, provinsi,nasional	pameran lokal 20, regional 10, Festival 10, Bantuan kemasan, sarana pemasaran,bantuan alat produksi,honor THL desain	1.131.134.000	DAU			1.131.134.000

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, yang mengakomodasi usulan kegiatan prioritas dari musrenbang tingkat kecamatan. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Bupati Purbalingga dan hasil usulan Pra Musrenbang dari masyarakat. Usulan Musrenbang diakomodir melalui program kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan
- b. Program Promosi dan Kemitraan Usaha

Adapun rencana aksi pelaksanaan musrenbang dapat dilihat dalam table dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Purbalingga**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Besaran / Volume	Catatan
1	Pelatihan program Packing bagi UMKM	Desa Sokanegara Kejobong	1 Paket	100.000.000,-
2	Pelatihan Marketing Online untuk pelaku UMKM"	Kel.Purbalingga Lor Purbalingga	1 Paket	100.000.000,-

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021-2026, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi **“Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“Naik Kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.”** dengan misi terdiri atas :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan usaha.
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

1. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 20 % per tahun.
2. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
3. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi dengan baik.
4. Tubuh dan kembangnya Wirausaha Baru.
5. Program OVOP berhasil.
6. Tumbuh dan kembangnya Koperasi berskala besar.

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementerian / lembaga maupun renstra provinsi. Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian :

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
2. Rencana Program / kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).

### **3.2. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, maka dalam kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UMKM. Penumbuhan usaha – usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UMKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga baik oleh internal maupun oleh Dinas Teknis terkait.
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses Pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim.

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan structural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan Pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran pada diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.  
Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga.  
Sasaran : Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga.
- b. Mengembangkan Produk Unggulan UMKM Kabupaten Purbalingga yang berdaya saing.  
Tujuan :
  1. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Kabupaten Purbalingga.
  2. Meningkatkan daya saing KUKM di Kabupaten Purbalingga.Sasaran :
  1. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Kabupaten Purbalingga
  2. Meningkatnya daya saing KUKM di Kabupaten Purbalingga.
- c. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.  
Tujuan :
  1. Meningkatkan jumlah wirausaha di Kabupaten Purbalingga.
  2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
  3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKMSasaran :
  1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Kabupaten Purbalingga.
  2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.
  3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten
  4. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.



### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil. Berikut disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dalam tabel berikut ini :

### 3.3. Program dan Kegiatan

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Purbalingga**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>										
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>7.762.458.200</b>				<b>7.796.480.500</b>	
					<b>3.221.771.200</b>				<b>3.198.871.000</b>	
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Dokumen RENSTRA, RENJA, LKPD, LPPD, LAKIP, LKD, RKPD, SPIP	DinkopUKM	8 lap	10.000.000	APBD	Tambahan dokumen RTP (apa perlu honor Tim)	8 lap	14.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terselesaikannya dokumen Evaluasi PD			5.500.000	APBD			6.500.000
2	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kebutuhan operasional kantor	DinkopUKM	14 Bulan	2.428.737.000	APBD	Gaji dan Tunjangan, tamsil	12 Bulan	2.463.542.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertaksananya Perjalanan dalam daerah	Kab. Purbalingga	157 OK	115.929.000	APBD	Perjalanan dalam daerah		125.929.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya adms keuangan penunjang Operasional Kantor	Dinkop UKM	20 orang/bulan	105.325.000	APBD	Honor Keuanagn, PHp, Honor Operator	12 bln	110.000.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen LKD, SPM	DinkopUKM	6 Dokumen	7.000.000	APBD	Honor, ATK, Penggandaan, Cetak		7.000.000

		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga.	DinkopUKM	6 jenis	5.500.000	APBD		6 jenis	6.000.000
		Penyediaan bahan logistik Kantor	tersedianya kebutuhan tabung gas,perabot kantor	DinkopUKM	12 bulan	90.000.000	APBD		12 bln	95.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	DinkopUKM	fc 20.000 lbr cetak 6000 lbr dan jilid 200 bh	13.000.000	APBD			14.500.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Koran dan Buku2 yang tersedia	DinkopUKM	24 Exemplar	5.280.000	APBD		24 Exemplar	5.800.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan ATK, Amplop Dinas, dan Kwitansi	DinkopUKM		12.450.200	APBD			13.700.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan makan dan minum	DinkopUKM		12.700.000	APBD			13.900.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Kinerja ASN	DinkopUKM	10 barang Barang	72.000.000	APBD	sarana kerja untuk PLUT werles dll	6 barang	33.000.000
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair	DinkopUKM	7 macam barang	54.500.000	APBD	Pembelian Meubel utk PLUT		20.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Materai, Perangko, by jasa pengiriman	DinkopUKM	Materai 6000= 100 lbr, 3000 = 150 lbr, Js.pengiriman	1.200.000	APBD		Materai 6000= 100 lbr, 3000 = 150 lbr, Js.pengiriman	1.500.000
		Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik	Tersedianya jaringan telepon,SDA dan Listrik,intemet,bantuan telepon kepala dinas	DinkopUKM	12bln	47.600.000	APBD		12 bln	50.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Makan minum Rapat, makan minum tamu dll	DinkopUKM		63.200.000	APBD			67.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinzn kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinzn kendaraan dinas operasional atau lapangan	DinkopUKM	12 bln	80.000.000	APBD		12 bln	83.000.000
		Pemeliharaan Meubel	Terpeliharanya Meubel	DinkopUKM	12 bln	3.000.000	APBD		12 bln	3.000.000
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Penunjang Kinerja ASN	DinkopUKM	12 bln	11.800.000	APBD		12 Bln	12.500.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DinkopUKM	2 Lokasi Gedung	75.000.000	APBD	Pemeliharaan gedung PLUT 50 jt dan kantor 15 jt, pembuatan taman kantor 10 jt		50.000.000

<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			<b>Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian</b>			<b>142.250.000</b>			<b>163.587.500</b>	
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah (jenis dan peserta) diklat kompetensi perkoperasian	Purbalingga	Pelatihan 100 orang	142.250.000	APBD	1. Pelatihan Kompetensi Pengelola Koperasi 2. Pelatihan Akuntansi Koperasi 3. Studi Komparasi 4. Monitoring Koperasi	120 kop	163.587.500
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			<b>Pertumbuhan volume usaha koperasi</b>			<b>287.147.000</b>				<b>300.000.000</b>
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Penambahan jumlah unit koperasi yang meningkat kualitasnya	Purbalingga	20 koperasi	287.147.000	APBD	1. Lomba inovasi Koperasi 2. Peringatan Harkop 3. Pasar Murah		300.000.000
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			<b>Persentase Koperasi Aktif</b>			<b>98.560.000</b>				<b>100.000.000</b>
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan kekuatan kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Penambahan unit koperasi aktif	Purbalingga	170 kop	98.560.000	APBD	Monev, Rakor Pengawasan		100.000.000

<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			<b>Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK</b>			100.708.000				120.000.000
8	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Purbalingga	60%	40.000.000	APBD	Penilaian kesehatan 65%		50.000.000
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	Purbalingga	30 koperasi	60.708.000	APBD	Penilaian kesehatan 35%, Penilaian kertas kerja kop award		70.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			<b>Persentase Peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin</b>			2.780.888.000				2.782.888.000
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang difasilitasi perijinan	Purbalingga	PIRT, MERK, IUMK	98.000.000	DAU	70 hak merk, 3 kali sosialisasi		100.000.000
		Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah kelembagaan UMKM yang difasilitasi pengembangannya	pbg, regional dan nasional	Pelatihan 2, magang, study komparasi, honor pendamping umkm 9 org, honor thl 4 org, Honor PLUT 6 Org, honor pendamping kecamatan 18 org	2.682.888.000	DAU	Tambahan Honor Pendamping PLUT 6 Orang, honor pendamping kecamatan 18 org x 1,9jt x 12 bin		2.682.888.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			<b>Persentase UMKM yang difasilitasi melalui internet</b>			1.131.134.000				1.131.134.000
10	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran	Barlingmas cab, provinsi, nasional	pameran lokal 20, regional 10, Festival 10, Bantuan kemasan, sarana pemasaran, bantuan alat produksi, honor THL desaint	1.131.134.000	DAU			1.131.134.000

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga “**Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia**”

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha ;ukecil Menengah Kabupaten Purbalingga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Purbalingga, 03 Januari 2022  
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah Kabupaten Purbalingga

**BAMBANG TRIONO, SKM, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700702 199203 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Mayjen. Sungkono No.26 Telp. ( 0281 ) 892374 Facs,. (0281) 892374

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR : 800/      TAHUN 2021**

**TENTANG**

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan OPD dalam mengoptimalkan Pencapaian sasaran, tugas pokok dan fungsi OPD perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Purbalingga
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu untuk ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10);
  11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 91);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026
  13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Surat Keputusan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

**Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinkop UKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinkop UKM adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga
6. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Surat Keputusan ini ditetapkan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- (2) Uraian mengenai Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.



### **Pasal 3**

Renja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dan berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan :

- a. RKA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- b. DPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- c. Alat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

### **Pasal 4**

Kepala OPD melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja OPD.

### **Pasal 5**

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan kewajiban melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing bidang.

### **Pasal 6**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA,

**BAMBANG TRIONO, SKM,M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700702 199203 1 006